DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Buku

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

Ali Akbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Semesta Aksara, 2019.

Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, 2005.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Boedi Djatmiko, *Asas dan Prinsip Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.

Khairrunisa, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008.

Lubis Yamin, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

N.D. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, 1991.

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tim Peneliti STPN, *Asas-Asas Keagrarian: Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2015.

Umar Said Sugiharto dkk., *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang, 2015.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Bandung: Kencana, 2015.

Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*, Jakarta: Prenada Media, 2018

Jurnal

Ana Silviana, Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Online Administrative Law & Governance Journal,* Vol. 4, 2021.

Ardiles Eric Panget, Penyelesaian Hak Atas Tanah yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda, *Lex Administratum*, Vol. 1 No. 3, 2013.

Damasha Khoiri Clevalda dan Dona Budi Kharisma, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dompet Digital Oleh Bank Indonesia, *Jurnal Private Law,* Vol. 9 No. 1, 2021.

Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4 No. 1, 2018.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2011.

Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi), *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2, 2014.

Meta Djohan Oe, Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2015.

Nia Putriyana dan Shinta Dwi Puspita, Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Arena Hukum,* Vol. 7 No. 3, 2014.

Pratomo Beritno, Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kota Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 5, 2020.

Rahmat Ramadhani, Pendaftaran Tanah sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 1.

Reda Manthovani dan Istiqomah, Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, 2021.

Rosita, Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi, *Jurnal Al-Bayyinah,* Vol. 1 No. 2, 2017.

Suyikati, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 1, 2019.

Tiarawati Poniskori, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Jurnal Lex Privatum,* Vol. 5 No. 2, 2017.

Lain-Lain

Akta Perolehan Hak No. 15 dari Pihak Terkait I Asril kepada Pihak Terkait II Thamrin.

Akta Perolehan Hak No. 22 dari Pihak Terkait II Thamrin kepada Pihak Terlapor Samali Sandra.

Berita Acara Gelar Mediasi Warti dan Samali.

Hasil Wawancara dengan Bapak Rejlen Fithoni, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Lubuklinggau, Via Zoom, 03 Februari 2025.

Surat Permohonan Mediasi 056/SM/BBK&P/XI/2024.